

## KONSTRUKSI PEMBERITAAN MEDIA TENTANG NEGARA ISLAM INDONESIA (ANALISIS FRAMING REPUBLIKA DAN KOMPAS)

Oleh :

**Mubarak/Made Dwi Adnjani**

Fakultas Ilmu Komunikasi Unissula Jalan Raya Kaligawe Km.4 Semarang

Email : mub gabus@yahoo.com/made@unissula.ac.id

### **Abstract**

*Case NII has the reach and appeal to the national and even international scale. The linkage between the interests of the state and the maker of the NII efforts being herded magnitude diverse opinions, ideas in display media pack. For media cases of kidnapping, brainwashing, and the efforts undertaken NII maker is not seen as an objective event only, but rather how it was constructed to be more meaningful to show attitude, bias or vested interest is behind the media. The media is assumed to not only bring back the reality of the news before the reader, but also include some assessment of the facts which are constructed in packaging certain attitude. The various interests in the fight in constructing the news media will cause the perspective of looking at an issue different from each other. To view the preferences of the attitude of the media framing analysis is used to highlight the problems the media strategy used to highlight and emphasize a particular fact in an event he preached.*

*Results showed Reporting Kompas and Republika related NII coverage is divided into several themes, namely: Government Not Decisive At NII, NII Linkages And Intelligence, NII and image of Islam, Dissolution NII, NII and Pondok Al Zaytun, NII And Other Party Involvement, Linkages NII and Intelligence. Kompas and Republika agree that the NII is treason and should be eliminated. They also regretted that government action tekesan let NII and tend to not assertive. Construction Kompas and Republika about NII distinguished from the way both establishing the facts and take the speakers. Compass complete with news analysis and research, while Reuters took the official sources of the various groups and state officials. Republika reminder of the importance to assist members of the NII to escape from the group. Compass stressed the importance of embracing militant radicalism to handle the case.*

### **Abstrak**

Kasus NII memiliki jangkauan dan daya tarik dengan skala nasional bahkan internasional. Keterkaitan antara kepentingan negara dan upaya maker dari kelompok NII menjadi *magnitude* yang menggiring beragam opini, ide, gagasan dalam tampilan bungkus pemberitaan media. Bagi media kasus penculikan, cuci otak, dan upaya maker yang dilakukan NII tidaklah dipandang sebagai sebuah peristiwa objektik semata, melainkan bagaimana peristiwa tersebut dikonstruksi menjadi lebih bermakna untuk menunjukkan sikap, keberpihakan atau *vested interest* yang ada dibalik pemberitaan media. Media diasumsikan tidak hanya menghadirkan kembali realitas berita ke hadapan pembaca, tetapi juga menyertakan sejumlah penilaian terhadap fakta yang dikonstruksi dalam kemasan sikap tertentu. Adanya berbagai pertarungan kepentingan di dalam mengonstruksi berita akan menyebabkan perspektif media dalam memandang suatu persoalan berbeda satu sama lain. Untuk melihat preferensi sikap media tersebut digunakan analisis *framing* yang menyoroti masalah strategi yang digunakan media untuk menonjolkan dan menekankan suatu fakta tertentu dalam suatu peristiwa yang diberitakannya.

Hasil penelitian menunjukkan Pemberitaan harian *Kompas* dan *Republika* terkait NII terbagi dalam beberapa tema pemberitaan yaitu: Pemerintah Tidak Tegas Pada NII, Kaitan NII Dan Intelegen, Nii Dan Citra Islam, Pembubaran NII, NII Dan Pondok Al Zaytun, NII Dan Keterlibatan Pihak Lain, Kaitan NII Dan Intelegen. Kompas dan Republika sepakat bahwa tindakan NII adalah perbuatan makar sehingga harus ditumpas. Mereka juga menyayangkan tindakan pemerintah yang tekesan membiarkan NII dan cenderung untuk tidak tegas. Konstruksi Kompas dan Republika tentang NII dibedakan dari cara kedua menyusun fakta dan mengambil narasumber. Kompas melengkapi pemberitaan dengan analisa dan penelitian, sementara Republika mengambil narasumber resmi dari berbagai kelompok dan pejabat Negara. Republika mengingatkan pentingnya untuk membantu anggota NII agar lepas dari kelompoknya. Kompas menekankan pentingnya merangkul kelompok garis keras untuk menangani kasus radikalisme.

**Kata Kunci :** *konstruksi, framing, media*

## Pendahuluan

Kasus cuci otak dan penghilangan beberapa mahasiswa di Malang Jawa Timur mengundang perhatian masyarakat. Agung Arief Perdana Putra, warga Perumahan Patria, Desa Bambe Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur menjadi salah satu korban cuci otak Jaringan gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Agung merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang (Kompas.com edisi Minggu, 24 April 2011). Kasus cuci otak yang menimpa 15 mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menjadi contoh bagaimana eksistensi gerakan NII di Indonesia masih kuat.

NII yang dikenal juga dengan nama Darul Islam atau (DI) yang artinya Rumah Islam adalah gerakan politik yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 (12 Sjawal 1368) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di di desa Cisampah, kecamatan Ciawiligar, kawedanan Cisayong Tasikmalaya, Jawa Barat.

Sebuah kasus yang memiliki daya tarik besar sudah pasti akan menarik minat dari media massa untuk memberitakannya. Semakin besar tingkatan kasus maka daya tarik media untuk memberitakannya semakin tinggi. Bagi media keberadaan *news value* pada suatu kasus ibarat emas pada sebuah tambang yang selalu dicari dan diperebutkan.

Kasus NII memiliki jangkauan dan daya tarik dengan skala nasional bahkan internasional. Keterkaitan antara kepentingan negara dan upaya maker dari kelompok NII menjadi *magnitude* yang menggiring beragam opini, ide, gagasan dalam tampilan bungkus pemberitaan media. Bagi media kasus penculikan, cuci otak, dan upaya maker yang dilakukan NII tidaklah dipandang sebagai sebuah peristiwa objektik semata, melainkan bagaimana peristiwa tersebut dikonstruksi menjadi lebih bermakna untuk menunjukkan sikap, keberpihakan atau *vested interest* yang ada dibalik pemberitaan media.

Harian Kompas dan Republika adalah dua media nasional yang tidak hanya memiliki jangkauan luas tetapi juga memiliki beragam kepentingan ekonomi, politik dan ideology yang berbeda. Oleh karena itu menarik untuk diketahui bagaimana pemberitaan tentang NII ditampilkan pada kedua media tersebut.

Dari fenomena di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah Apakah tema berita NII di *Kompas* dan *Republika*? Bagaimana konstruksi pemberitaan NII di koran *Kompas* dan *Republika*? Labelisasi apa yang dipakai oleh *Kompas* dan *Republika* dalam mengkonstruksi pemberitaan NII?

*Frame* menurut Gamson dan Mondigliani adalah cara bercerita atau

gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan objek suatu wacana (Sobur,2002:162). Sedangkan Beterson memaknai *frame* sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan-pandangan politik, kebijakan dan wacana, dan menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas (Sudibyo,2001:219).

Analisis *Framing* termasuk kedalam paradigma konstruksionis. Pandangan konstruksionis diperkenalkan oleh Peter L Berger dengan gagasannya yang memandang bahwa manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis dan plural secara terus-menerus (Eriyanto,2002:13). Masyarakat tidak lain adalah produk manusia, namun secara terus menerus mempunyai aksi kembali terhadap penghasilannya. Sebaliknya, manusia adalah hasil produk masyarakat. Seseorang baru menjadi pribadi yang beridentitas sejauh ia tetap tinggal di dalam masyarakatnya.

Dalam pandangan Berger proses dialektis tersebut melalui tiga tahapan yang disebut momen. *Pertama*, eksternalisasi yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia baik dalam kegiatan mental maupun fisik. *Kedua*, objektivasi yaitu hasil yang telah dicapai baik secara mental maupun fisik dari eksternalisasi yang telah dilakukan manusia. Eksternalisasi menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi manusia itu sendiri. Sebagai contoh adalah manusia menciptakan alat dan bahasa untuk mempermudah hidupnya. Alat maupun bahasa yang dihasilkan manusia akan mengatur bagaimana ia bekerja dan berfikir sesuai bahasa yang dihasilkannya. *Ketiga*, internalisasi yaitu proses penyerapan kembali dunia objektif kedalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat. Bagi Berger realitas tidak dibentuk secara ilmiah tetapi ia dikonstruksi. Dengan pemahaman seperti ini realitas berarti berwajah ganda/plural. Setiap orang

dapat memiliki pandangan berbeda-beda terhadap realitas yang sama.

Dalam konteks berita, Berger berpendapat bahwa berita merupakan konstruksi realitas bukannya sebagai cermin realitas. Karenanya sangat potensial suatu peristiwa yang sama dikonstruksi secara berbeda. Berita yang dihasilkan merupakan hasil proses dialektis antara wartawan dengan fakta. Dalam proses eksternalisasi wartawan melibatkan diri secara fisik dan mental untuk memaknai realitas. Konsepsi tentang fakta yang sudah ada di benak seorang wartawan digunakan untuk melihat realitas. Hasil interaksi antara pandangan wartawan dengan peristiwa yang terjadi di lapangan menghasilkan berita yang tersaji di media.

Pandangan konstruksionis tentang media dan berita berbeda dengan pandangan positivis yang selama ini dikenal. Ignas Kleden mengungkapkan bahwa positivis merupakan ilmu sosial yang mengambil metode ilmu alam dan menerapkannya dalam bidang kemasyarakatan. Ilmu sosial seperti ini bisa mengamati, menguraikan dan mengkritik obyek studinya, tetapi tidak sanggup mengamati, menguraikan dan mengkritik dirinya sendiri, berupa asumsi-asumsinya, nilai yang membentuk asumsinya, maupun kecenderungan ideologis yang secara diam-diam mempengaruhi pembentukan teori-teorinya. (Oetama: 2001:vii)

Dalam pandangan konstruksionis fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi. Realitas itu subjektif, ia hadir karena dihadirkan oleh wartawan. Hal ini berlawanan dengan konsepsi positivis yang memandang ada realitas yang bersifat eksternal yang hadir sebelum wartawan datang. Kalangan konstruksionis memandang media sebagai agen konstruksi realitas sedangkan dalam pandangan positivis media adalah sebagai saluran. Sebagai agen konstruksi, media bukanlah saluran yang bebas, ia merupakan agen yang mendefinisikan realitas. Berita yang kita baca bukan hanya menggambarkan realitas tetapi

juga menunjukkan konstruksi dari media itu sendiri.

Dalam pandangan positivis berita dipandang sebagai informasi yang dihadirkan, sedangkan dalam pandangan konstruksionis berita dipandang sebagai potret dari arena pertarungan antara berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa. Dalam pandangan konstruksionis berita sebagai hasil konstruksi realitas bersifat subjektif Hal ini bertentangan dengan pandangan positivis yang memandang berita adalah bersifat objektif yang harus menyingkirkan opini dari pembuat berita.

Menurut Edelman apa yang kita ketahui tentang realitas atau tentang dunia tergantung pada bagaimana kita membingkai dan mengkonstruksi realitas. Edelman mensejajarkan *framing* sebagai kategorisasi yaitu pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata tertentu pula yang menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami. Kategorisasi dalam pandangan Edelman merupakan abstraksi dan fungsi dari pikiran. Kategori membantu manusia memahami realitas yang beragam dan tidak beraturan. Disisi lain kategorisasi berarti juga penyederhanaan realitas yang kompleks dengan hanya memberikan penekanan pada sisi tertentu saja. Pada akhirnya kategorisasi dapat mengarahkan pandangan khalayak akan suatu isu dan membentuk pengertian mereka tentang suatu isu.

Salah satu aspek penting dari kategorisasi adalah rubrikasi yaitu bagaimana suatu peristiwa dikategorisasikan dalam rubrik-rubrik tertentu. Rubrikasi bukan semata-mata persoalan teknis dari suatu prosedur pemberitaan tetapi juga merupakan bagian dari bagaimana fakta diklasifikasikan dalam kategori tertentu.

### Metoda Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif

deskriptif berdasarkan pendekatan analisis framing. Analisis framing merupakan salah satu model analisis yang bisa mengungkapkan rahasia di balik perbedaan, bahkan pertentangan media dalam mengungkapkan fakta. Sedangkan *framing* menurut Entman (dalam Eriyanto, 2002: 67). Analisis framing mempunyai asumsi bahwa wacana media massa mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan apa yang penting atau signifikan bagi publik dari bermacam-macam isu dan persoalan yang hadir dalam wacana publik

Subjek penelitian : yaitu konstruksi realitas. Yaitu apa saja yang ditulis oleh Kompas dan Republika mengenai berita-berita tentang NII dan bagaimana mereka menyajikannya, kemudian bagaimana Kompas dan Republika memilih realitas/-fakta, menekankan bagian tertentu, melakukan seleksi dan menghubungkan bagian tertentu sehingga makna peristiwa lebih mudah diingat dan dipahami khalayak. Objek penelitian : pemberitaan mengenai NII di Kompas dan Republika selama bulan April-Mei 2011.

Sumber data primer: sumber utama dalam penelitian ini adalah pemberitaan pada Kompas dan Republika. Dalam penelitian yang dimaksud dengan berita adalah a pemberitaan mengenai NII yang muncul di Kompas dan Republika selama bulan April-Mei 2011. Sumber data sekunder : adalah data pendukung lainnya yang tidak diperoleh secara langsung. Data sekunder penelitian ini berasal dari studi literatur, buku maupun laporan-laporan penelitian lain yang sejenis yang mendukung penelitian.

Pengumpulan dan analisis data untuk kepentingan analisis framing dilakukan secara langsung dengan mengidentifikasi wacana berita berdasarkan pada model Zhondang Pan dan Gerald Kosicki. Data hasil identifikasi tersebut dianalisis untuk melihat struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

**Kerangka Framing Pan dan Kosicki**

<b>Struktur</b>	<b>Perangkat Framing</b>	<b>Unit yang Diamati</b>
1. Sintaksis, yaitu cara wartawan menyusun fakta	Skema berita	a. Headline merupakan berita yang dijadikan topik utama oleh media b. Lead (teras berita) merupakan paragraf pembuka dari sebuah berita yang biasanya mengandung kepentingan lebih tinggi. Struktur ini sangat tergantung pada ideologi penulis terhadap peristiwa. c. Latar informasi d. Kutipan e. Sumber f. Pernyataan g. Penutup
2. Skrip, yaitu cara wartawan mengisahkan fakta	Kelengkapan berita	5W+1H
3. Tematik, yaitu cara wartawan menulis fakta	Detail, koherensi, bentuk kalimat, kata ganti	Paragraf, proporsi kalimat, hubungan kalimat
4. Retoris, yaitu cara wartawan menekankan fakta	Leksikon, grafis, metafora	Kata, idiom, foto, grafik

**Pembahasan****Framing Harian Republika**

Sebagai media yang selama ini dipandang banyak memberitakan Islam kalangan moderat, Republika secara tegas menyatakan bahwa NII adalah sebuah gerakan sesat karena itu harus segera dibubarkan. Upaya untuk mengingkari kesepakatan adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah tindakan makar yang tidak dibenarkan dalam Islam. Untuk mendukung klaim Republika tersebut, sumber dari Majelis Ulama Indonesia dikutip dalam pemberitaan. Berikut kutipan berita tersebut:

Rabu, 11 Mei 2011 MUI: NII Itu Gerakan Makar

*Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai Negara Islam Indonesia (NII) termasuk dalam kategori "bughat" (melakukan perbuatan makar) terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, MUI menegaskan gerakan itu harus dicegah, ditindak dan diberantas.*

Dilihat dari struktur sintaksis yang digunakan, *lead* Republika memilih untuk mengambil berita dari narasumber resmi yang secara kewenangan adalah ketua lembaga negara dalam urusan agama. Ketua MUI adalah representasi tokoh Islam di Indonesia yang suaranya secara resmi mewakili kepentingan umat Islam. *Latar*

yang digunakan adalah sebuah kaidah dalam hukum Islam yang membahas tentang *bughot*. Setiap upaya untuk mengkhianati kesepakatan adanya NKRI adalah tindakan *bughot* (pemberontakan kepada Negara).

*"Setiap upaya pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia dan pemisahan diri dari NKRI yang sah dalam pandangan Islam termasuk bughat. Haram hukumnya dan wajib diperangi oleh negara," kata Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin, saat membacakan pernyataan MUI di Jakarta, Rabu (11/5).*

Kutipan pernyataan tersebut yang dijadikan dasar dari Republika untuk menilai perbuatan NII sebagai tindakan makar terhadap Negara. Sumber lain dari MUI yaitu K.H Amidhan menjadi sumber kutipan yang mendukung konstruksi pemberitaan Republika tentang tindakan makar dari NII. Berikut kutipan dari berita tersebut:

*"MUI tidak akan menerbitkan fatwa haram untuk gerakan NII," kata Amidhan pada diskusi "Dialektika: Radikalisme Berkedok Agama Ancaman untuk NKRI" di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/4). Menurut dia, gerakan radikalisme yang terjadi di Indonesia sudah jelas bertentangan dengan hukum dan agama sehingga tanpa diterbitkan fatwa haram memang sudah haram*

Tindakan radikalisme yang dilakukan NII sudah jelas merupakan suatu keharaman sehingga tidak perlu lagi dikeluarkan fatwa keharamannya. Dua sumber dari MUI yang dikutip oleh Republika menunjukkan dengan jelas sikap dari media ini dalam memandang tindakan NII. Tindakan makar adalah suatu keharaman dan menjadi domain hukum pidana. Islam memberikan kaidah *bughot* pada tindakan yang dilakukan oleh NII sehingga harus ditumpas.

Selain mengutip dari MUI, Republika juga menggunakan sumber lain yang secara resmi menilai NII adalah sebuah gerakan yang harus dibubarkan. Berikut beberapa

berita yang mendukung sikap Republika untuk menumpas NII:

*Sabtu, 30 April 2011, "Ketua FPD DPR RI Desak Pemerintah Bubarkan NII", Kamis, 05 Mei 2011 Matikan NII, Pemerintah Harus Bekukan Ahmadiyah, Rabu, 11 Mei 2011 MUI: NII Itu Gerakan Makar, Selasa, 17 Mei 2011 Ketum PBNU: Pemerintah kok tak Tegas ke NII?*

Beberapa sumber berita yang digunakan oleh Republika menunjukkan sikap nyata dari media ini bahwa makar terhadap NKRI tidak dapat ditolerir. Sumber dari PBNU selaku organisasi Islam terbesar di Indonesia menjadi penguat dari pernyataan MUI. Berikut kutipan pernyataannya:

*Selasa, 17 Mei, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menilai pemerintah belum bersikap tegas dalam menyikapi gerakan Negara Islam Indonesia (NII).*

*"Rencana mendirikan negara atau pemerintah yang bersifat negara dalam negara itu 'bughat'. Bisa saja mereka itu Islam, tapi harus dilawan, karena Islam yang membangkang harus ditegasi," katanya di Surabaya, Selasa malam.*

*Menurut dia, pemerintah seharusnya bersikap tegas, karena kelompok radikal teologi yang dibiarkan akan menjadi kelompok radikal teroris yang akan membahayakan negara dalam jangka panjang.*

Untuk mengimbangi pemberitaan dari sumber kalangan Islam, Republika juga mengutip pernyataan dari kalangan politisi untuk menguatkan konstruksi pemberitaan tentang tindakan makar NII. Berikut kutipan beritanya:

*Sabtu, 30 April 2011, Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI meminta ketegasan pemerintah untuk membubarkan gerakan separatisme Negara Islam Indonesia (NII). "Bagi Fraksi Demokrat, Islam Yes, Negara Islam Indonesia No, perilaku kekerasan yang mengatasnamakan agama adalah bentuk nyata kesesatan berpikir dan kebuntuan*

*intelektual anggota NII," ujar Jafar di depan sekitar seribu santri dan ustadz Ponpes As'adiyah*

Kutipan pernyataan dari ketua FPD DPR RI tersebut menjadi sumber dari kalangan politisi yang menguatkan sikap media ini. Republika secara tegas menyatakan bahwa NII adalah organisasi terlarang dan harus dibubarkan, meski demikian media ini juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak tegas dalam menangani kasus ini. Ada proses pembiaran yang justru mengisyaratkan adanya permainan dan upaya pemanfaatan keberadaan NII bagi kepentingan tertentu. Beberapa berita yang terkait dengan hal itu diuraikan berikut ini:

*Selasa, 17 Mei 2011 Ketum PBNU: Pemerintah kok tak Tegas ke NII? Sabtu, 30 April 2011, "Ketua FPD DPR RI Desak Pemerintah Bubarkan NII", Kamis, 28 April 2011 MUI: Pemerintah Sudah Tahu NII, Tapi Belum Tegas Selasa, 03 Mei 2011 Pemerintah Biarkan NII Berkembang? Ini Tanggapan Sekretaris Kabinet Dipo Alam*

Beberapa judul berita tersebut menggambarkan dua hal yang terjadi dalam menyikapi kasus NII. *Pertama* secara tegas Republika menggunakan sumber dari MUI dan Ketua Umum PBNU untuk mengkonstruksi pemberitaan yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak tegas dalam menyikapi NII. Pemerintah tahu tetapi tidak mengambil tindakan nyata untuk membubarkan NII. *Kedua*, ada upaya dari Republika untuk melakukan *cover both side* dengan menghadirkan alibi pembelaan pemerintah yang diwakili oleh menteri Sekretaris Kabinet. Berikut kutipan berita yang berisi pernyataan resmi dari MUI melalui ketuanya:

*Kamis, 28 April 2011 Ketua Majelis Ulama Indonesia, Amidhan, mendesak pemerintah segera bertindak tegas dengan radikalisme NII yang akhir-akhir ini berkembang. Sikap tegas, kata Amidhan, supaya tidak semakin*

*membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

*"Sebenarnya lokasi-lokasi, tempatnya dan siapa yang bertanggung jawab, pemerintah sudah tahu," kata Ketua MUI Amidhan dalam diskusi di gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis.*

Pernyataan Amidhan adalah *latar resmi* yang disampaikan oleh lembaga Negara yang merupakan representasi perwakilan umat Islam. Pernyataan Amidhan dalam kutipan tersebut menekankan proses pembiaran dan ketidaktegasan pemerintah dalam menyikapi NII. Penilaian terhadap ketidaktegasan pemerintah juga berasal dari ketua ormas Islam terbesar yaitu PBNU. Untuk memperkuat pernyataan umat Islam, Republika juga mengutip pernyataan ketua umum ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu NU. Kutipan berikut berasal dari Ketua umum PBNU:

*Selasa, 17 Mei 2011 Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menilai pemerintah belum bersikap tegas dalam menyikapi gerakan Negara Islam Indonesia (NII). "Rencana mendirikan negara atau pemerintah yang bersifat negara dalam negara itu 'bughat'. Bisa saja mereka itu Islam, tapi harus dilawan, karena Islam yang membang--kang harus ditegasi," katanya di Surabaya, Selasa malam.*

Pernyataan Amidhan dan Ketua Umum PBNU menunjukkan sebuah bukti yang jelas bahwa keberadaan NII hanya membutuhkan keseriusan pemerintah untuk menanganinya. NII bukanlah perkara baru yang harus dicari landasan hukum untuk menanganinya, karena itu disebut bahwa ketegasanlah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tanggapan dari pemerintah untuk mengimbangi sumber dari MUI dan Ketua Umum PBNU berasal dari menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Berikut petikan pernyataannya:

*Selasa, 03 Mei 2011 Sekretaris Kabinet Dipo Alam di Jakarta, Selasa, membantah tuduhan bahwa pemerintah melakukan pembiaran terhadap gerakan*

*Negara Islam Indonesia (NII). "Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah beberapa kali meminta aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya aksi terorisme, radikalisme, dan konflik horizontal," tegasnya.*

*Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lemah dalam mengupayakan ketertiban masyarakat. "Negara, pemerintah, TNI, dan Polri mengemban tugas yang tidak boleh ditawar-tawar untuk betul-betul menjaga keamanan negara ini. Keamanan dalam arti luas, berarti pertahanan, keamanan dalam negeri, dan juga luar negeri. Dan itu untuk melindungi rakyat," kata Presiden.*

Pernyataan dari pemerintah yang diwakili oleh menteri Sekretaris Kabinet sama sekali tidak menunjukkan pernyataan khusus. Kutipan pernyataan Dipo Alam tersebut sesungguhnya tidak menggambarkan secara spesifik sikap pemerintah terhadap NII. Pernyataan presiden tentang pentingnya keamanan dan tindakan antisipatif terhadap terorisme, radikalisme dan konflik horizontal adalah pernyataan umum yang bisa dimaknai beragam. Sebagai contoh terorisme dan radikalisme yang dimaksud dalam pernyataan:

*"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah beberapa kali meminta aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya aksi terorisme, radikalisme, dan konflik horizontal," tegasnya*

Terdapat makna dan maksud yang sangat luas dari pernyataan tersebut. Terorisme bisa merujuk pada beragam tindakan pengeboman yang terjadi dan biasa disebut sebagai tindakan terror. Radikalisme merujuk pada peristiwa yang lebih luas dengan beragam. Tindak kekerasan yang bisa terjadi di setiap sendi kehidupan. Dalam ranah rumah tangga juga memungkinkan terjadi tindakan radikal meskipun dalam skala kecil. Konflik horizontal yang dimuat dalam pernyataan tersebut lebih merujuk pada konflik kesukuan, kedaerahan atau konflik yang muncul dari eksistensi peristiwa politik. Beberapa pemilu di daerah menyisa-

kan konflik panjang antar pendukung yang terus terjadi berulang-ulang.

Struktur *skrip*, Republika menekankan aspek *who* yang diwakili oleh sumber berita dari pihak pemerintah dan *what* yaitu apa yang disampaikan oleh para sumber berita tersebut. Kutipan pernyataan Dipo Alam yang digunakan oleh Republika sebagai sumber dari pemerintah tidak menegaskan bagaimana sikap tegas pemerintah terhadap NII. Hal ini menggambarkan sebuah analogi terbalik. Ketika Republika seolah ingin menunjukkan aspek pembelaan dari pemerintah sumber yang dirujuk dalam berita justru membuat sikap pemerintah semakin tidak jelas. Sesungguhnya pernyataan dari Dipo Alam tersebut dengan sendirinya juga memperkuat konstruksi dari Republika bahwa pemerintah memang tidak tegas dalam menyikapi NII.

Ketidaktegasan pemerintah dalam menyikapi NII memunculkan kecurigaan kalau kasus tersebut memiliki kaitan dengan tindakan intelejen. Ada dua asumsi yang mungkin muncul yaitu, *pertama*, NII adalah permainan intelejen dan *kedua* kasus NII menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menambah kewenangan intelejen. Kedua asumsi tersebut mengemuka ditengah pembahasan RUU Intelejen yang sedang dilakukan antara pemerintah dan DPR. Pemerintah membutuhkan *opinion pressure* yang efektif untuk mempengaruhi pembahasan RUU tersebut. Berikut beberapa berita yang terkait dengan hal tersebut:

*Jumat, 06 Mei 2011 NII Rekayasa Intelejen? Ini Jawaban Pangdam Brawijaya, Jumat, 29 April 2011 Jangan Jadikan NII Alasan Tambah Kewenangan Intelejen, Kamis, 28 April 2011 Menko Polhukam Tampik Intelejen Terlibat dalam NII, Kamis, 28 April 2011 AM Fatwa: Dulu NII 'Mainan' Ali Murtopo*

Sumber dari Kepolisian dan pemerintah (Menkopolkam) menjadi sumber yang menyatakan tidak ada kaitan antara intelejen dengan NII. Sementara sumber dari kalangan wakil rakyat



mengingatkan bahwa keberadaan NII tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk menambah kewenangan intelejen. Berikut pernyataan dari petinggi Kepolisian yang menegaskan hal tersebut:

*Jumat, 06 Mei 2011 Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memastikan gerakan Negara Islam Indonesia (NII) bukan rekayasa pihak intelijen.*

*"NII buatan intelijen? Untuk apa? Masak intelijen untuk mengganggu negara sendiri? Tidak mungkin," kata Mayjen Gatot Nurmantyo Surabaya, Jumat.*

*Meskipun demikian, dia menganggap bahwa tidak menutup kemungkinan pihak intelijen asing menjadi bagian dari meluasnya modus doktrinasi model NII tersebut. Namun, Pangdam tidak bersedia menyebutkan negara mana yang menyusupkan intelijennya itu*

Sebagai institusi yang berkaitan langsung dengan praktek intelejen sudah sewajarnya jika kepolisian menolak dugaan keterlibatan intelejen dalam kasus NII. Sebuah pernyataan resmi yang bersifat normatif dan semestinya keluar dari lembaga tersebut. Dalam pemberitaan dimana narasumber sudah bisa dimaklumi isi pernyataannya sesungguhnya berita tersebut tidak lagi menghadirkan *news value* yang berbeda. Hal ini sama dengan sebuah parodi "kalau ada manusia digigit anjing itu bukan berita, tapi kalau ada manusia menggigit anjing maka itu layak disebut berita". Sebuah kelaziman dan rutinitas dari suatu tindakan atau pernyataan tidak lagi menarik dalam pemberitaan. Jadwal pekerjaan manusia yang bersifat rutin adalah contoh bagaimana tidak menariknya peristiwa tersebut meski pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan besar.

Berikut petikan dari sumber pemerintah yang diwakili oleh Menkopolkukam dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

*Kamis, 28 April 2011, Menko Polhukam Djoko Suyanto menampik jika ada intelejen di balik gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Lagipula, gerakan tersebut sampai saat ini belum jelas keorganisasiannya. "Yang ngomong itu siapa, tidak ada, tidak ada. Isu itu dari mana?. Kayak kurang kerjaan TNI sama Intelijen saja," ujarnya, di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Kamis (28/4).*

*Sementara itu, Kepada Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto meminta supaya tidak menduga-duga siapa yang berada di balik NII. Termasuk dugaan bahwa TNI menukangi gerakan tersebut. "Tidak usah berpikir sampai situlah. Jangan berpikiran pada masa-masa yang lalu. Ini sudah reformasi. Sekarang tidak ada yang semacam itu. Sekarang sudah transparan, masyarakat sudah bisa melihat apapun yang kita lakukan," paparnya.*

Menkopolkukam Djoko Suyanto mengingatkan pentingnya perubahan paradigma dalam menilai kinerja intelejen di era reformasi. Keterlibatan intelejen dalam tindakan yang di skenario untuk makar terhadap Negara dianggap tidak lagi relevan untuk disampaikan. Penegasan tersebut muncul dalam petikan pernyataan:

*"Tidak usah berpikir sampai situlah. Jangan berpikiran pada masa-masa yang lalu. Ini sudah reformasi. Sekarang tidak ada yang semacam itu. Sekarang sudah transparan, masyarakat sudah bisa melihat apapun yang kita lakukan," paparnya*

Sebuah penegasan bahwa pola-pola lama dalam dunia intelejen sudah ditinggalkan. Pernyataan bersayap tersebut sesungguhnya memunculkan penegasan terbalik bahwa praktek keterlibatan intelejen memang sering dilakukan di masa lalu. Muncul sebuah kecurigaan apakah praktek tersebut sudah hilang atau justru masih eksis seperti di masa lalu. Republika memberikan *cover both side* dalam pemberitaan dengan

melibatkan beragam narasumber pro dan kontra. Meski demikian konstruksi yang dibangun dalam pemberitaan menyajikan sebuah prediksi bahwa ada kemungkinan memang intelejen terlibat. Berikut petikan dari sumber politisi yang berkaitan dengan keterlibatan intelejen:

*Kamis, 28 April 2011 Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (DPD), AM Fatwa, menyatakan di balik NII dulu ada Ali Murtopo yang dikenal sebagai petinggi militer Indonesia. Fatwa menuding Ali sebagai aktor penting yang bermain di balik aksi radikal berupa pemboman yang terjadi dahulu. Fatwa menyebutkan, mendiang Ali Moertopo merekrut mantan pejuang DI/TII yang kini dinamakan Negara Islam Indonesia (NII) untuk melakukan aksi-aksi radikal. Mantan pejuang DI/TII atau kini NII itu ditipu oleh seorang intelijen, Djaelani. Kelompok inilah yang merusak kantor polisi dan merekayasa pembajakan Pesawat Garuda Indonesia di Woyla, Thailand. Selain itu, kelompok ini diduga terlibat rekayasa sejumlah kasus kekerasan, seperti pencurian senjata api di sebuah tempat.*

Pernyataan AM Fatwa ingin memberikan sebuah *latar* bahwa keberadaan NII di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran militer. Kecurigaan bahwa sampai saat ini praktek tersebut masih mungkin berjalan merupakan konstruksi pemberitaan yang mengarah pada upaya untuk mematahkan alibi pemerintah. A.M Fatwa adalah sosok aktifis yang sering berseberangan pendapat dengan pemerintah sejak masa orde baru. Pernyataannya meski bersifat reflektif berdasar pengalaman di masa lampau tetaplah membuka pandangan dan kewaspadaan dari berbagai pihak terhadap kemungkinan keterlibatan intelejen.

Penegasan agar tidak menggunakan isu NII untuk mempengaruhi pembahasan RUU Intelejen juga muncul dari wakil rakyat lainnya. Berikut petikannya:

*Jumat, 29 April 2011, Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan menegaskan*

*personalan NII jangan dikaitkan dengan RUU Intelejen yang akan dibahas Komisi I DPR. Menurutnya, NII dan RUU Intelejen adalah dua hal berbeda. "Jangan sampai NII ini dijadikan alasan untuk menambah kewenangan intelejen," katanya saat ditemui, Jumat, (29/4).*

*Ia menegaskan isu NII yang berkembang di masyarakat tidak boleh menjadi landasan untuk mempercepat pembahasan RUU tersebut. Sebab, sudah ada mekanisme dan peraturan tersendiri mengenai pembentukan UU.*

Republika mengembangkan dua konstruksi utama dalam pemberitaan tentang NII. Sikap tegas untuk menumpas NII diikuti dengan pertanyaan tentang keseriusan pemerintah. Hal ini berkembang menjadi konstruksi pemberitaan kedua tentang latar keterlibatan intelejen yang mungkin membuat pemerintah tidak bisa tegas. Republika bersikap tegas dalam menyikapi kasus NII, mereka meminta pemerintah untuk memberi tindakan tegas karena sudah termasuk perbuatan makar. Meskipun demikian Republika menekankan perlunya sikap toleransi dan upaya untuk membantu para anggota NII agar tidak terperosok semakin jauh. Berikut petikan berita yang berkaitan dengan hal tersebut:

*Petikan berita Republika Minggu, 01 Mei 2011 "Anggota Negara Islam Indonesia (NII) harusnya dibina, bukan malah dikecam ramai-ramai atau dimarginalkan. Pernyataan tersebut diungkapkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Ishaq, saat ditemui wartawan usai menghadiri pembukaan musyawarah kerja daerah (muskerda) PKS, di GOR Patriot, Bekasi, Ahad (1/5)".*

*Luthfi berharap agar masyarakat jangan terus menyudutkan NII, ditakutkan gerakan mereka justru akan semakin meluas jika terus dipojokkan. Banyak cara untuk melunakkan gerakan tersebut, diantaranya dengan gerakan persuasive.*

Ketegasan dalam menyikapi NII perlu diikuti dengan upaya untuk membantu mereka yang terjebak masuk dalam organisasi tersebut agar bisa keluar. Kondisi mereka diibaratkan seperti pasien pecandu narkoba. Perbuatan mereka jelas melanggar hukum karena konsumsi narkoba yang mereka lakukan. Disisi lain mereka sesungguhnya adalah korban yang justru harus dibantu agar lepas dari ketergantungan terhadap narkoba.

Para pengikut NII adalah korban bujukan dan doktrinasi yang dilakukan oleh para pengurus kelompok ini. Karena itu mereka justru harus dibantu agar bisa keluar dan kembali ke masyarakat dengan semestinya. Upaya untuk memarjialkan mereka bukanlah solusi yang tepat. Sikap ini ditekankan oleh Republika berdampingan dengan pentingnya tindakan tegas. Tindakan para pengurus NII bukanlah representasi dari keinginan umat Islam karena justru yang mereka lakukan mencoreng nama baik Islam.

### Framing Harian Kompas

Lazimnya sebuah isu nasional yang sedang hangat diperbincangkan, maka kasus merebaknya NII yang diwarnai aksi cuci otak, penculikan dan pemerasan juga mendapat perhatian serius dari Kompas. Beberapa judul berita berikut memberikan gambaran bagaimana konstruksi pemberitaan Kompas tentang NII.

*Jum'at, 6 MEI 2011 NII Tindakan Makar, Mahasiswa, TNI, Polisi, Pemerintah Daerah Teken Deklarasi Anti-NII, Sabtu, 7 mei 2011 Polri Harus Tegas Terhadap NII Dua Tersangka Terkait Jaringan NII Ditangkap Rabu, 27 April 2011 Lukman Hakim: Bubarkan NII, Kamis, 28 April 2011 Sudah Lama Pemerintah Mengetahui NII!*

Kompas secara tegas menyebut tindakan NII adalah sebuah makar, karena itu harus ditindak dengan tegas. Berikut kutipan berita Kompas dengan merujuk kepada beberapa narasumber.

Megawati: Harus Tegas Tangani NII Sabtu (30/4/2011).

*Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah tegas terhadap ideologi-ideologi yang menolak Pancasila seperti Negara Islam Indonesia (NII). "Kita seharusnya tegas mengenai hal tersebut, kita tahu bahwa ideologi kita Pancasila dan itu sebagai konstitusi bangsa dan negara," kata Megawati di Jakarta, Sabtu (30/4/2011).*

*Kamis, 28 April 2011, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis untuk melumpuhkan jaringan Negara Islam Indonesia karena membahayakan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Priyo, munculnya kembali aksi terorisme dan juga kelompok-kelompok radikal seperti NII sangat mencoreng*

Narasumber yang menjadi rujukan Kompas dalam menilai tindakan NII berasal dari kalangan politisi dan ketua partai politik. Megawati yang menjadi narasumber berita bukan sekedar seorang ketua partai politik tetapi juga mantan presiden. Pernyataan yang dikeluarkan memiliki nilai berita yang lebih tinggi daripada narasumber biasa. Label makar yang diberikan Kompas dibarengi dengan istilah radikal, membahayakan persatuan, aksi terorisme dan ideology yang bertentangan dengan Pancasila.

Dari sisi sintaksis Kompas bersandar pada kutipan, dengan narasumber ketua partai politik, sisi Skrip: menekankan *who, where, what, why*. Untuk menyusun sebuah konstruksi pemberitaan yang menyatakan bahwa perbuatan NII adalah tindakan makar, Kompas tidak hanya bersandar pada kutipan pernyataan narasumber. Kutipan pernyataan tersebut diperkuat dengan investigasi guna memberikan fakta sosiologis yang bisa mendukung pernyataan tersebut. Berikut beberapa berita ringan tentang data dan fakta NII

*Sabtu, 7 Mei 2011, Imam Supriyanto : Ingat Kegelisahan Orangtua, Rabu, 27 April 2011 Demi NII, 2 Mahasiswi*

*Sedekah Rp60 Juta, Rabu, 27 April 2011  
Perekrut NII Pria Gagah Wanita  
Menarik, Sabtu, 30 April 2011 Yang  
Perlu Diketahui dari NII, Kamis, 28  
April 2011 Anggota NII Mencapai  
160.000 Orang*

Berita-berita tersebut menguatkan gambaran bahwa aksi NII bukanlah tindakan main-main. Keinginan mereka untuk makar diikuti serangkaian usaha untuk merekrut anggota dan persiapan lain yang bersifat financial. Dalam berita tersebut Kompas memberikan contoh dan gambaran detail bagaimana sistematisa rekrutmen anggota NII, kekuatan keuangan, jaringan, dan besarnya pengikut. Gambaran tersebut memberikan *latar* yang kuat dalam konstruksi pemberitaan yang menyebutkan bahwa makar dari NII bukanlah isapan jempol.

NII adalah gerakan makar dan harus ditumpas sampai ke akarnya. Meskipun gerakan NII sudah diketahui pemerintah namun upaya untuk menumpas gerakan ini tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena banyak pihak yang memanfaatkan keberadaan NII untuk kepentingan ekonomi dan politik. Berikut berita yang menyatakan hal tersebut:

Sabtu, 30 April 2011, Politisi-  
Pemerintah Manfaatkan NII

*Tanpa menghiraukan sepak terjang Pondok Pesantren Al-Zaitun atau gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang diduga kuat berasal darinya, para politisi dan sejumlah penguasa di negara ini disebut-sebut turut memanfaatkan keberadaan Al-Zaitun dan gerakannya. Apalagi kalau bukan untuk kepentingan pragmatis.*

*Peneliti sejarah Darul Islam/NII Sholahudin tak menampik kedekatan pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang dengan para politisi, penguasa dan non-penguasa. Sholahudin mengatakan ada Gedung M. Soeharto.*

*"Kita memang akhirnya lihat bahwa Al-Zaitun punya hubungan-hubungan misterius dengan para politisi dan penguasa. Pemerintah dan DPR dari*

*dulu tak bisa terlalu tegas, karena menurut mereka Al-Zaitun bisa memberikan banyak suara meski enggak terlalu signifikan," katanya dalam diskusi mingguan Polemik di Warung Daun Cikini, Sabtu (30/4/2011).*

Upaya untuk memanfaatkan NII bukanlah hal baru. Kondisi tersebut terjadi sejak jaman orde baru. Di Pondok Al-Zaitun Indramayu yang menjadi markas pergerakan terdapat gedung M. Soeharto dan gedung lain yang merupakan sumbangan dari beberapa tokoh politik dan penguasa. Kepentingan pragmatis untuk mendapatkan dukungan politik menjadi latar belakang dari tindakan tersebut. Berita Kompas ini menjadi latar yang mendukung konstruksi pemberitaan bahwa NII adalah gerakan makar yang sudah diketahui namun sulit untuk diberantas.

Pernyataan yang menyebutkan bahwa NII sulit dibendung justru dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu untuk menuntaskan persoalan NII. Berikut petikan pernyataan berita tersebut:

Menhan: Sulit Hambat NII Jumat, 29 April 2011

*Pemerintah sulit mengantisipasi munculnya gerakan radikal, termasuk Negara Islam Indonesia atau NII. Menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, kesulitan itu muncul karena Indonesia belum memiliki landasan undang-undang keamanan nasional dan UU intelijen.*

Menteri pertahanan beralasan bahwa Indonesia belum memiliki landasan undang-undang keamanan yang memadai untuk membendung gerakan NII. Alasan tersebut menjadi alibi yang diketengahkan pemerintah untuk menjawab pertanyaan kenapa tidak mampu membereskan kasus NII. Tindakan makar yang dilakukan secara terstruktur semestinya bisa dengan mudah diketahui dan dilakukan upaya untuk menghentikannya.

Konstruksi pemberitaan kedua yang dikembangkan oleh Kompas adalah keterkaitan antara NII dan Al Zaitun. Keterkaitan tersebut juga menyeret

keberadaan Bank Century yang sedang menjadi sorotan. Berikut petikan berita tersebut:

NII-Bank Century Ada Kaitannya Sabtu, 30 April 2011

*Jaringan Negara Islam Indonesia (NII) ternyata memiliki hubungan dengan pemilik Bank Century Robert Tantular. Pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang yang disebut-sebut berafiliasi dengan NII pernah menanamkan investasinya sebesar Rp 250 miliar di bank bermasalah tersebut.*

Kompas memberikan *latar* yang mengaitkan hubungan antara NII, Al Zaytun dan Bank Century. Kedekatan antara pimpinan Al Zaytun yaitu Panji Gumilang dengan pimpinan Bank Century Robert Tantular disebut sebagai dasar dari keterkaitan tersebut. Jumlah tabungan NII di bank tersebut tidak kurang dari 250 miliar. Sumber Kompas untuk berita tersebut adalah peneliti keberadaan Darul Islam. Berikut petikan pernyataan Sholahudin yang meneliti keberadaan Darul Islam:

*"Begini, dana itu dikonversi dari emas 2 ton. Dia (NII) itu punya program Harikatul Khirot. Anggotanya wajib menginvestasikan emas berapa banyak per bulan, sampai ada yang jual rumah. Terkumpul emas 2 ton dikonversi uang sampai Rp 250 miliar. Kemudian dana diinvestasikan di Bank Century," ungkap peneliti sejarah Darul Islam/NII, Sholahudin, di Warung Daun Cikini, Sabtu (30/4/2011) siang.*

Pernyataan peneliti yang berada di luar keanggotaan NII masih perlu diverifikasi kebenarannya. Pernyataan Sholahudin tentang keuangan NII menjadi penguat dari konstruksi pemberitaan Kompas. Sumber Kompas yang lebih menguatkan konstruksi pemberitaan tersebut adalah pernyataan mantan Menteri NII. Berikut petikan pernyataannya:

Eks Menteri NII: Punya Aset Emas 20 Ton, Jumat, 29 April 2011

*Bekas Menteri Peningkatan Produksi Negara Islam Indonesia (NII) Imam Supriyanto membenarkan adanya simpanan kelompok itu di Bank Century, kini jadi Bank Mutiara. Namun, berbeda dengan data yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Imam Supriyanto menyebut jumlah dana justru mencapai Rp 250 miliar*

Berita lain yang mengaitkan keberadaan Al Zaytun di belakang NII adalah kenyataan sulitnya untuk memberantas NII meski pemerintah telah mengetahuinya. Berikut petikan berita tersebut:

Politisi-Pemerintah Manfaatkan NII Sabtu, 30 April 2011

*Tanpa menghiraukan sepak terjang Pondok Pesantren Al-Zaitun atau gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang diduga kuat berasal darinya, para politisi dan sejumlah penguasa di negara ini disebut-sebut turut memanfaatkan keberadaan Al-Zaitun dan gerakannya. Apalagi kalau bukan untuk kepentingan pragmatis.*

*Peneliti sejarah Darul Islam/NII Sholahudin tak menampik kedekatan pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang dengan para politisi, penguasa dan non-penguasa. Sholahudin mengatakan ada Gedung M. Soeharto.*

*"Kita memang akhirnya lihat bahwa Al-Zaitun punya hubungan-hubungan misterius dengan para politisi dan penguasa. Pemerintah dan DPR dari dulu tak bisa terlalu tegas, karena menurut mereka Al-Zaitun bisa memberikan banyak suara meski enggak terlalu signifikan," katanya dalam diskusi mingguan Polemik di Warung Daun Cikini, Sabtu (30/4/2011).*

Hubungan antara Al Zaytun dengan pemerintah membuat mereka mengalami kesulitan untuk menumpas gerakan ini. Sumber berbeda dalam menilai kesulitan pemerintah untuk menumpas NII tidak lepas dari tindakan pemerintah yang melakukan pembiaran terhadap gerakan ini. Ketua PP

Muhammadiyah Din Syamsudin menjadi narasumber yang membahas tindakan tersebut.

Din: Negara Melakukan Pembiaran, Kamis, 28 April 2011

*Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan, kembali mencuatnya pergerakan kelompok Negara Islam Indonesia (NII) karena adanya pengabaian dan pembiaran oleh negara. Menurutnya, isu NII sudah ada sejak lebih kurang 20 tahun lalu. Namun, negara tidak hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Padahal, Majelis Ulama Indonesia telah menurunkan fatwa ini sejak dulu, tetapi pemerintah tetap tak bisa menyelesaikannya.*

Pernyataan Din sebagai ketua ormas Islam terbesar kedua di Indonesia memberikan indikasi kuat bahwa permasalahan terbesar dalam upaya pemberantasan NII adalah keseriusan pemerintah untuk melakukannya. Pernyataan senada juga disampaikan oleh MUI terkait perkembangan NII di Indonesia.

Perkara kedekatan NII dengan Al Zaytun bukanlah konstruksi pemberitaan yang menarik mengingat isu tersebut telah muncu sejak lama. Kompas menyajikan sebuah konstruksi pemberitaan lain yaitu keterkaitan antara intelejen dengan NII sehingga keberadaan NII sesungguhnya adalah hasil kerja intelejen. Kondisi ini bisa dimengerti karena pembahasan RUU Intelejen sedang dibahas antara pemerintah dengan DPR. Berikut petikan berita yang berkaitan dengan hal tersebut:

NII Muncul karena Politik Intelijen?, Kamis, 28 April 2011

*Peneliti Setara Institute Ismail Hasani mensinyalir, mencuatnya kembali gerakan Negara Islam Indonesia (NII) memunculkan dugaan bahwa intelijen tak bekerja hingga tuntas untuk menelusuri akar-akar radikalisme. Ia menduga, ada sisi politis dari oknum*

*intelijen yang memang membiarkan kelompok radikal berkembang dan eksis dengan menyisakan satu orang anggotanya untuk menjaga aktivitas gerakan tersebut. Hal itu diungkapkan Ismail, Kamis (28/4/2011) di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.*

*Lebih lanjut ia mengatakan, ada dugaan pihak-pihak tertentu yang berusaha melegalkan sejumlah gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam agar bisa dimanfaatkan sebagai ladang politik untuk perebutan kekuasaan. Hal ini mengakibatkan gerakan seperti NII yang sebenarnya sudah berkembang lama tidak pernah benar-benar terputuskan jaringannya, termasuk bentuk-bentuk jaringan teroris.*

Penelitian yang menjadi dasar pemberitaan Kompas memberikan dasar bagaimana kemungkinan kaitan NII dengan intelejen sangat mungkin terjadi. Beragam kepentingan dibelakang NII menjadi dasar berkembangnya organisasi ini. Dugaan keterlibatan intelejen juga mengemuka karena penyebaran NII marak terjadi justru ketika pembahasan RUU Intelejen dilakukan. Pertanyaan yang mengemuka adalah posisi intelejen yang dianggap tidak jelas ketika NII menyebar. Sebuah pertanyaan menarik muncul dalam petikan berita Kompas berikut.

Ke Mana Intelijen Saat NII Menyebar?, Rabu, 27 April 2011

*Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saefudin menyatakan, sebagian masyarakat mempertanyakan bagaimana kinerja intelijen saat ini hingga Negara Islam Indonesia kembali tumbuh di tengah masyarakat dan melakukan tindakan radikalisme.*

*Menurut dia, kehadiran NII menjadi pekerjaan rumah bagi intelijen untuk mengungkap siapa yang berada di balik gerakan ini. "NII bukan baru setahun, dua tahun. Ini kan sudah ada sejak tahun 1960-an. Kenapa sekarang kemudian semakin marak dan eksis? Ini*

*yang menjadi pekerjaan rumah intelijen untuk mengungkap siapa di balik ini. Intelijen kita harus bekerja keras," ujarnya*

Pernyataan tersebut mengungkap dengan jelas bahwa keterlibatan intelejen dalam merebaknya NII sangat mungkin terjadi. Keberadaan NII yang sudah puluhan tahun di Indonesia namun belum juga mampu ditumpas memunculkan kecurigaan terhadap kinerja intelejen dan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus ini.

### **Perbandingan Framing Harian Republika dan Kompas**

Republika dan Kompas sepakat bahwa NII adalah gerakan makar yang harus ditindak tegas. Kompas dalam beberapa berita dan analisa yang diberikan memberikan porsi yang cukup untuk menganalisa kaitan antara NII-Al Zaytun-Bank Century. Kompas membuat sebuah konstruksi bahwa persoalan NII saat ini bukan sekedar tindakan makar belaka, namun nuansanya justru sarat kepentingan politik dan ekonomi dari berbagai pihak. Kasus Century yang tidak jelas penyelesaiannya dikaitkan dengan keberadaan NII. Konstruksi semacam ini yang membedakan antara Republika dan Kompas.

Republika memberikan penekanan bahwa NII adalah gerakan sesat dan harus dibubarkan. Meski demikian Republika memberi penekanan bahwa para anggota NII semestinya tidak dimusuhi. Mereka semestinya ditolong dan diberi bantuan agar tidak tersesat. Konstruksi yang dikembangkan Kompas didukung dengan analisa dan hasil penelitian yang memadai sementara Republika lebih banyak mengandalkan kutipan pernyataan dari narasumber resmi.

### **Kesimpulan**

1. Pemberitaan harian *Kompas* dan *Republika* terkait NII terbagi dalam beberapa tema pemberitaan yaitu: Pemerintah Tidak Tegas Pada NII,

Kaitan NII Dan Intelejen, Nii Dan Citra Islam, Pembubaran NII, NII Dan Pondok Al Zaytun, NII Dan Keterlibatan Pihak Lain, Kaitan NII Dan Intelejen

2. Kompas dan Republika sepakat bahwa tindakan NII adalah perbuatan makar sehingga harus ditumpas. Mereka juga menyayangkan tindakan pemerintah yang tekesan membiarkan NII dan cenderung untuk tidak tegas. Keterlibatan pemerintah dan politisi untuk memanfaatkan NII dinilai sebagai penyebab lambatnya penanganan.
3. Konstruksi Kompas dan Republika tentang NII dibedakan dari cara kedua menyusun fakta dan mengambil narasumber. Kompas melengkapi pemberitaan dengan analisa dan penelitian, sementara Republika mengambil narasumber resmi dari berbagai kelompok dan pejabat Negara.
4. Republika mengingatkan pentingnya untuk membantu anggota NII agar lepas dari kelompoknya. Kompas menekankan pentingnya merangkul kelompok garis keras untuk menangani kasus radikalisme.

### **Implikasi Hasil Studi**

Selama ini media sering dianggap sebagai cermin realitas (*mirror of reality*) yaitu media merupakan refleksi obyektif dari realitas atau icon dari realitas. Konsekuensinya media dianggap sebagai saluran netral yang memantulkan realitas di depannya dan menyalurkannya kepada khalayak. Dengan kondisi ini, maka obyektifitas dan independensi menjadi kiblat dan klaim setiap media di dunia. Tak mengherankan jika mereka selalu mengklaim telah bertindak obyektif, seimbang dan tidak berpihak pada kepentingan apapun kecuali menyuarakan kebenaran dan memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi terpercaya. Dalam posisi ini media dipercaya sebagai institusi yang bebas nilai dan menghadirkan berita yang obyektif. Media sering didudukkan sebagai pihak yang dianggap mampu menyuarakan realitas

sesungguhnya di lapangan dan menjadi pembela dari kebenaran fakta.

Akan tetapi, pada kenyataannya anggapan tersebut tidak selalu benar. Dalam banyak kasus, ketimbang merupakan refleksi dari realitas media justru bertindak sebagai pemalsu realitas, menopenginya, mengemas sedemikian rupa atau bahkan menghadirkan realitas dalam kemasan berita yang sesuai dengan keinginan mereka. Dalam kondisi demikian, ketimbang menjadi cermin realitas media lebih menjadi cermin kepentingan yang di dalamnya realitas diinterpretasikan berdasarkan struktur kepentingan dibalik media itu sendiri.

Hal tersebut menunjukkan bahwa media bukanlah sekadar saluran bebas nilai, justru media bertindak sebagai *value ladent*. Berita media selalu dipenuhi dengan berbagai muatan kepentingan baik dari internal maupun eksternal media. Dengan kerangka pemberitaan yang dikembangkan, media secara sadar mengonstruksi fakta di lapangan untuk menjadi pesan dan kemudian memberikan penilaian sesuai kehendak mereka. Maka tidak mengherankan jika suatu fakta yang sama bisa dinilai berbeda oleh berbagai media. Sebagai contoh, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa bisa dinilai sebagai upaya memperjuangkan kepentingan rakyat atau bahkan tindakan anarkis tergantung media yang memberitakannya. Proses penilaian itu berlangsung dengan sangat halus sehingga khalayak tidak menyadari bahwa mereka sedang digiring untuk menilai persoalan sesuai media yang dikonsumsi. Penilaian tersebut diawali dari proses *news gathering* ketika seorang wartawan menghadapi realitas di lapangan. Wartawan di lapangan secara sadar memilih dan menonjolkan sebagian realitas yang dihadapinya sebagai bahan berita. Proses ini berlanjut di meja redaksi dimana mereka memilih dan menilai realitas mana yang layak diberitakan dan penilaian apa yang harus diberitakan.

Proses inilah yang terjadi dalam *framing* (pembingkai) berita. Realitas sosial yang kompleks, penuh dimensi dan tidak beraturan disajikan dalam berita yang

sederhana, beraturan dan memenuhi logika tertentu. Dengan penyederhanaan tersebut realitas dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca sesuai dengan bingkai yang dikembangkan media. Upaya tersebut dilakukan oleh media agar berita yang disampaikan kepada pembacanya sesuai dengan ideologi mereka. Namun, penyederhanaan tersebut juga berarti hilangnya sebagian realitas karena media hanya menampilkan realitas yang sesuai kehendak mereka. Akibatnya apa yang dikonsumsi oleh konsumen media hanyalah sebagian kecil dari realitas yang ada. Penyederhanaan masalah ini akan mempengaruhi cara pandang pembaca media yang terbatas pada apa yang disajikan media yang mereka konsumsi. Kondisi ini akan menjadi senjata yang ampuh untuk memobilisasi opini publik, membatasi kesadaran publik dan persepsi mereka terhadap suatu masalah, dan menggiringnya pada ingatan tertentu. Media menyediakan perspektif tertentu dalam memandang suatu peristiwa seakan hanya perspektif itulah yang benar digunakan untuk memahami dan mendefinisikan suatu peristiwa.

### Daftar Pustaka

- Agus Sudibyo, 2001, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta, LKis.
- Alex Sobur, 2002, *Analisis Teks Media*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- A M Hoeta Soehoet, 2002, *Teori Komunikasi 2*, Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta IISIP
- Andi Bulaeng, 2004, *Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer*, Yogyakarta: Andi.
- Bimo Nugroho, Eriyanto, Frans Surdiasis, 1999, *Politik Media Mengemas Berita*, Jakarta: ISAI
- Dedy Mulyana, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya



- Dedy Djamaludin Malik, 1999, *Hegemoni Budaya*, Yogyakarta: Bentang.
- Eriyanto, 2002, *Analisis Framing*, Yogyakarta: Lkis
- Heri Winarko, 2002, *Mendeteksi Bias Berita, Panduan Untuk Pemula*, Yogyakarta: KLIK
- Jacob Oetama, 2001, *Pers Indonesia*, Jakarta: Kompas
- Littlejohn, Stephen W, 1996, *Theories of Human Communication, Fifth Edition*, Belmont California: Wadsworth Publishing Company
- McQuail, Dennis, 2003, *Teori Komunikasi Massa, Edisi Terjemahan*, Jakarta: Erlangga.